

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan ke era reformasi menjadi awal kebebasan pers karena pemerintah mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Dampak dari tidak diberlakukannya SIUPP menjadi awal mula bermunculan usaha penerbitan di Indonesia. Dengan dicabutnya SIUPP pers mendapat kebebasan akan tetapi tidak disertai dengan tanggung jawabnya.

Sejak itu, pers Indonesia kembali ke sistem pers ketika negara kita menganut sistem demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, yaitu sistem pers liberal barat. Bahkan sistem pers kita di era reformasi ini sedemikian bebasnya sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa pers kita sudah tidak lagi terikat oleh etika dan rasa tanggungjawab atas kepentingan masyarakatnya. Padahal, di negara asalnya sendiri Amerika serikat, pers liberal sudah ditinggalkan sejak tahun 1956 dan kini negara itu bahkan menganut sistem pers yang bertanggungjawab sosial (Kusumaningrat, 2012: 37)

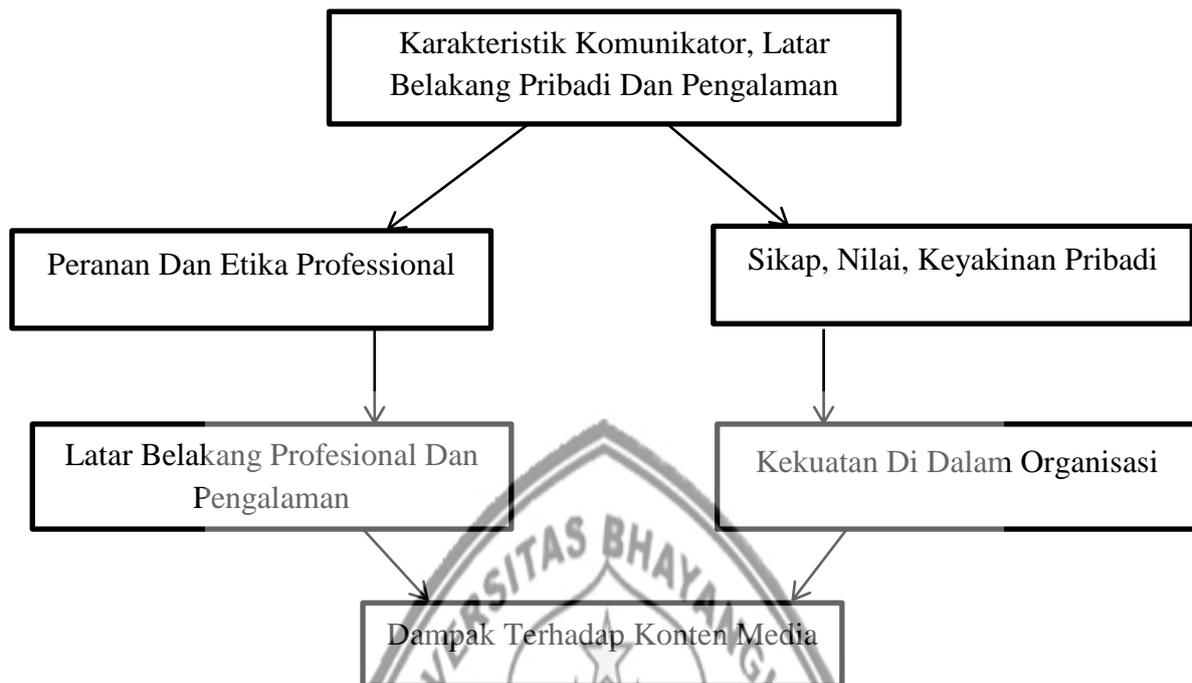
Minat menjadi wartawan pun meningkat, hingga 2002, misalnya jumlah wartawan indonesia yang semula 8.000 meningkat menjadi 30.000 orang. Dari jumlah ini wartawan yang berada di Jakarta sebanyak 40.000 orang dengan rincian 3.500 orang tergabung sebagai anggota PWI dan sisanya menjadi anggota organisasi kewartawanan lainnya (Azzam,1998; Soebagijo I,N 1998; sukardi;2007). Jumlah penerbitan pers selama 30 tahun era orde baru sebanyak

300 buah, pada awal-awal reformasi(1999) juga meningkat menjadi 1.700 buah (Dewan Pers,2002) (Dr.Wahyu Wibowo, 2009:54)

Wartawan merupakan bagian penting dalam perkembangan pers Indonesia. Bertugas memberikan informasi melalui berita dan akan disampaikan kepada pembaca atau khalayaknya. Dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis banyak hal yang harus diperhatikan oleh wartawan seperti memberikan informasi yang objektif, akurat, membuat berita tanpa memihak, tidak mencampurkan opini kedalam berita, serta memberikan pendidikan kepada pembacanya. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab II Pasal 3 Ayat 1 Pers Nasional mempunyai fungsi, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi pers di Indonesia, menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman yang harus diikuti oleh seluruh wartawan dalam menjalankan profesi kejournalistikannya. Dalam kode etik tersebut terdapat sebelas pasal yang mengatur norma dan etika yang baik dan harus diikuti seorang wartawan.

Dalam prakteknya pemberitaan yang dibuat oleh wartawan selalu berkaitan dengan kebijakan redaksional, sehingga wartawan pasti mengikuti segala hal yang menjadi aturan dalam medianya. Terkait hal tersebut setiap media mempunyai ideologi dalam menentukan kebijakan editorialnya. Wartawan dituntut profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan pers tempatnya bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese, 1991 dalam buku teori komunikasi massa.



Bagan 1.1 Shoemaker dan Resee, 1991 (McQuail,2011:30)

Dari penjabaran di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah media wartawan memang tidak sepenuhnya mempunyai wewenang dalam pemberitaan yang akan diterbitkan berita yang telah terbit merupakan hasil dari seluruh orang yang ada di media tersebut. Dari bagan Shoemaker dan Resee tersebut terdapat dua jalur yaitu yang pertama menyembunyikan karakter personal dari penulis atau wartawan, dan jalur lain yaitu kedudukan atau status dalam organisasi memungkinkan adanya komunikator yang individual.

Wartawan yang profesional tentu merupakan wartawan yang memiliki etika dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, yang mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi yang baik, tentu dengan adanya etika jurnalisme wartawan dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

Pada dasarnya peran seorang wartawan memang sangat penting, karena tidak hanya bertugas menyampaikan informasi tetapi fungsi dari wartawan juga sebagai pengawas dari pemerintah, atau bisa dikenal dengan istilah *watchdog*. Wartawan memang bertugas menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Marry Mapes mengatakan bahwa jurnalisisme adalah alat yang paling penting yang kita miliki untuk menjaga agar pemerintah jujur, menjaga agar demokrasi tetap utuh. Inti menulis berita adalah suatu pekerjaan mulia (Iswari,2011:33)

Perubahan pers ke era reformasi berdampak pula yang semula pers sebagai *watchdog* menjadi *lapdog*, seperti yang dikemukakan oleh Luwi Iswari dalam bukunya jurnalisisme dasar, mereka tidak lagi bertindak sebagai *watchdog*, tetapi telah berubah menjadi *lapdog*, yang patuh pada “tuan” mereka (2011,36). Pada idealismenya profesi sebagai wartawan bukanlah hal yang mudah, akan tetapi perkembangan zaman seperti perubahan yaitu dengan di tetapkannya UU No 40 tahun 1999 tentang pers, yang berdampak bagi pers indonesia dan di cabutnya Surat Izin Usaha Penerbita Pers (SIUPP), menjadi salah satu penyebab banyaknya wartawan yang bermunculan.

Johnstone, Slawski, dan Bowman (1972) menemukan sejumlah jurnalis yang menganggap diri mereka “netral” dan melihat pekerjaan mereka sekedar saluran penyampai atau *channels of transmission*. Yang lainnya melihat diri mereka sebagai “partisipan”, yakni bahwa jurnalis harus menyaring (*to sift through*) informasi dalam menemukan dan mengembangkan berita. Menurut jurnalis yang netral, pekerjaan mereka adakah menyampaikan informasi ke publik

secepatnya, menghindari berita yang isinya belum diverifikasi, berkonsentrasi pada audiens yang terbanyak, dan menghibur khalayak (Nasution,2015:82)

Berdasarkan penjabaran diatas, sejumlah jurnalis yang menganggap profesinya sebagai penyalur sebuah pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat tanpa melihat dan mempertimbangkan isi pesan atau berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ada juga yang melihat profesinya sebagai partisipan, yaitu sebagai orang yang harus menyaring pesan yang akan disampaikan. Pentingnya kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, agar tidak hanya memandang profesinya hanya sebagai penyalur saja, tanpa melihat isi berita yang karena sebuah berita akan mempunyai dampak bagi pembacanya.

KOMISI Nasional Antike-kerasan Perempuan (Komnas Perempuan), mengungkapkan sebagian media massa masih melanggar Kode Etik dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dalam peluncuran laporan berjudul analisa media, Sejauhmana Media telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual, semester II (Juli-Desember 2015) di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/6), Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amirrudinn, memaparkan pihaknya menganalisis pemberitaan sembilan media nasional terkait tema kekerasan seksual dalam rentang Juli-Desember 2015. Kesembilan media itu ialah Indopos, Jakarta Globe, Kompas, Tempo, Jakarta Post, Media Indonesia, Republika, Pos Kota dan Koran Sindo. Berdasarkan analisis itu, ada 70 berita dari tujuh media dengan mengungkapkan identitas korban kekerasan seksual. Urutannya, Pos Kota dengan 23 pelanggaran, Kompas 16 pelanggaran, Indopos

12, Tempo 8, Koran Sindo 7, Republika 3, Media Indonesia1
(www.mediaindonesia.com)

Berdasarkan kutipan diatas mendapatkan urutan pertama yang masih melanggar kode etik, maka dari itu penulis memilih Pos Kota sebagai subjek dari penelitian ini. Pos Kota merupakan salah satu surat kabar yang terbit harian di jakarta dan sekitarnya, surat kabar ini bisa dikatakan salah satu surat kabar yang mengiringi perkembangan Pers di indonesia, karena di lihat dari usianya yang lahir pada tahun 1970.

Tampilan dari segi tata letak yang tidak beraturan di setiap terbitannya, dan menggunakan judul yang menarik dengan menambahkan karikatur yang menggambarkan isi berita, serta penggunaan warna-warna yang mencolok pada bagian halaman depan. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi pembacanya yaitu kalangan menengah kebawah yang memang menjadi segmentasinya. Di sisi lain dalam mengemas berita Pos Kota menggunakan bahasa sehari-hari sehingga tidak menggunakan bahasa jurnalistik yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh sekretaris Pos Kota yaitu Bapak Tio “ Pos Kota memang menggunakan bahasa yang membumi, dalam arti lain bahasa yang disesuaikan dengan segmentasi.
(26/04/2016)

Edisi Pos Kota rabu 13 April 2016 penulis melihat Pos Kota tidak menerapkan kode etik jurnalistik sebagai pedoman untuk jurnalis Indonesia. Dalam kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi “ wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pada poin 4 yaitu cabul terdapat penafsiran cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto,

gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.



Gambar 1.1 Pos Kota, Edisi 13 April 2016

Penulis ingin melihat bagaimana konsep diri wartawan Pos Kota dalam memaknai profesinya sebagai seorang wartawan yang di satu sisi harus tetap mengikuti fungsi pers yang telah tercantum dalam UU Pers No 40 tahun 1999, sekaligus tetap mengikuti kebijakan editorial yang ada di perusahaan pers tempatnya bekerja. Menurut William D Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai “ konsep diri adalah pandangan dan perasaan dalam diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan fisis (Rakhmat, 2015:98). Seperti yang dimukakan oleh Wiiliam yang relevan dengan penelitian ini bagaimana wartawan berita kriminal Pos Kota memaknai dan memandang profesinya sebagai jurnalis. Penulis memilih wartawan berita kriminal karena Pos Kota memang terkenal sebagai surat kabar kriminal yang memang terlihat dalam setiap terbitannya berita kriminal selalu menjadi *headline news*.

Teori Interaksi simbolik menjadi penunjang dalam penelitian ini, yaitu Interaksionisme simbolik adalah salah satu dari teori awal ilmu sosial yang mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana kita mempelajari budaya dan bagaimana budaya membentuk pengalaman hidup kita sehari-hari (Stanley&Dennis,2014:374). Dalam buku *mind , self, and society*, (1934) Mead berpendapat bahwa kita menggunakan simbol untuk menciptakan pengalaman kita akan pikiran sadar, pemahaman kita akan diri sendiri, dan pengetahuan kita akan dunia sosial yang lebih besar (masyarakat) (Stanley&Dennis, 2014:376)

Interaksionisme simbolik menyatakan bahwa tindakan kita dalam merespons simbol-simbol adalah umumnya juga dikontrol oleh simbol-simbol yang sama. Oleh karena itu, pemahaman seseorang serta hubungan dengan realitas fisik dan objekif dijumpai oleh lingkungan simbolik-pikiran, diri, dan masyarakat yang sudah kita hayati. Jika dipahami dengan cara lain, maka makna yang kita berikan pada simbol menggambarkan diri kita sendiri dan realitas yang kita alami. Ketika kita bersosialisasi maka makna yang disepakati secara budaya mengontrol interaksi kita dengan lingkungan. (Stanley&Dennis, 2014:377)

Berdasarkan hal di atas relevan dengan penelitian ini yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana konsep diri wartawan berita kriminal yang ada di Pos Kota memaknai profesinya yang disebut sebagai simbol. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Fenomenologi

Menurut Schutz Fenomenologi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupannya di dunia. (Gunawan,2013:83) Konsep *existential phenomenology* versi Schutz dikelompokkan sebagai fenomenologi dalam konteks

sosiologi, yang dikembangkan dalam konsep weber .Analisis fenomenologi terhadap arti / makna didasarkan pada aliran kesadaran (*stream of consciousness*) yang mendasari konsep “*reflexity*“.

Menurut Schutz (1967) *consciousness* tidak memiliki makna (meaning) sendiri, tetapi sangat bergantung pada *reflexity* yaitu proses memutar kembali apa yang terjadi dalam kehidupan. *Meaning* melekat pada tindakan dan hanya pada pengalaman yang telah terjadi yang memiliki makna. *Atribute* atas makna terletak pada tujuan yang dikehendaki oleh individu tersebut. Kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan melihat apa yang ada (*natural attitude*) berdasarkan pada “*intersubjective understanding*”. (Gunawan,2013:76).

Maka dari itu penulis mengambil judul sebagai berikut “ **Konsep Diri Wartawan Berita Kriminal Pada Surat Kabar Pos Kota (Studi Fenomenologi Konsep Diri Wartawan Dalam Memaknai Profesi Sebagai Jurnalis).**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat fokus penelitian sebagai berikut :

“ **Bagaimana Konsep Diri Wartawan Berita Kriminal Pada Surat Kabar Pos Kota ”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini berdasarkan yang penulis uraikan di latar belakang, adapun pertanyaan penelitian ini mengenai :

1. Apa Motif Wartawan Berita Kriminal Bekerja Pada Surat Kabar Pos Kota ?
2. Bagaimana Wartawan Berita Kriminal Pada Surat Kabar Pos Kota Dalam Memaknai Profesi Sebagai Seorang Jurnalis ?
3. Bagaimana Pengalaman Komunikasi Wartawan Berita Kriminal Pada Surat Kabar Pos Kota ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa motif wartawan berita kriminal yang bekerja pada surat kabar Pos Kota
2. Untuk mengetahui bagaimana wartawan berita kriminal pada surat kabar Pos Kota dalam memaknai profesi sebagai seorang jurnalis
3. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman komunikasi wartawan berita kriminal pada surat kabar Pos Kota

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi mengenai ilmu komunikasi yaitu tentang Konsep Diri Wartawan dalam memaknai profesi kejournalistikannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada wartawan dalam memaknai profesi agar sesuai dengan fungsinya

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah penelitian, serta terdapat fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat kerangka konsep yang menguraikan tentang definisi konsep, kerangka teori, yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran penulis tentang penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma penelitian dengan teori postpositivisme, pendekatan penelitian fenomenologi, informan penelitian, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab empat ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan, serta profil subjek dan objek penelitian

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.